

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amin, S.M. 1970. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita

Djais, Mochammad. 2004. *Pikiran Dasar Eksekusi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Djais, Mochammad dan RMJ. Koosmargono. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.

Fauzan, M. 2005. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hanitijo, Ronny Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Harahap, Yahya. 1991.*Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*. Bogor: Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu.
- Hasan,Burhanuddin, dan Harinanto Sugiono. 2015*Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hiariej, Eddy O.S. 2012.*Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018.*Buku Panduan E-Court*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010.*Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*.
- Manan,Abdul.2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mansyur, Ridwan danD.Y. Witanto. 2017.*Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahanya*. Jakarta Timur: Pustaka Dunia.
- Maruhutagalung, Sophar. 2011.*Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo,Sudikno. 1998.*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muljono, Wahyu. 2012.*Teori Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yusita.
- Sasangka,Hari. 2005 *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Subekti,R. 1977.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sugeng, Bambang danSujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutarman. 2009.*Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tirtaamidjaja,M.H. 1962.*Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Witanto , D.Y.*Hukum Acara Mediasi dalam Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.Bandung: Alfabeta CV.
- Yahya, M. Harahap. 2009.*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Het herzeine Indonesisch reglement (Staadblad tahun 1941 Nomor 44).*
- Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staadblad Tahun 1847 Nomor 52).*
- Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staadblad Tahun 1927 Nomor 227).*
- Kitab Undang-Undang Acara Perdata (KUHAPER).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
353/DJU/SK/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan
Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan
Peradilan Umum.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 271/DJU/SK/PS01/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
112/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna
Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

C. Jurnal

Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni. *"Sistem Informasi Penelusuran Perkara"*. Diplomatika Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Volume 1 Nomor 1. September 2017.

Ika Atikah. *"Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia"*. Social and Political Challenges in Industrial. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Volume 4.

Marjo. *"Tinjauan Terhadap Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri"*. Masalah-Masalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 4 Desember 2007.

D. Majalah

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *"Prospek dan Tantangan Impelementasi E-Court"*. Majalah Peradilan Agama, November 2018.

E. Website

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum, diakses tanggal 4 Mei 2019.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/>, diakses tanggal 20 Februari 2019.

<http://pn-kisaran.go.id/images/e-court/FAQ.pdf>, diakses tanggal 5 Mei 2019.

<https://www.kbbi.web.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2019.

